

Judul : Kasus Bunuh Diri Jadi Cermin Kerentanan
Tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Kasus Bunuh Diri Jadi Cermin Kerentanan

Pemerintah meminta kasus bunuh diri siswa SD di NTT diselidiki menyeluruh. Selain itu, pemerintah daerah dan masyarakat juga diminta untuk lebih peka dan responsif.

JAKARTA, KOMPAS — Kasus bunuh diri yang dilakukan oleh seorang anak SD di Nusa Tenggara Timur menunjukkan masalah. Pemerintah pusat menginstruksikan jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi warga di sekitarnya.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, di Jakarta, Rabu (4/2/2026), menyatakan, peristiwa tersebut menjadi perhatian DPR. Ia menilai tragedi yang menimpa anak SD itu merupakan pukulan berat dan menunjukkan masih adanya kerentanan perlindungan anak di tengah persoalan ekonomi keluarga.

>> BACA JUGA:

Krisis Kesehatan Mental

Masalah bunuh diri pada anak bukan semata menjadi kesalahan individu, melainkan juga kegagalan kolektif. KOMPAS.ID

komp.as/krisismental

BACA JUGA **HLM 5**

"Ini menjadi perhatian kita juga. Ini pukulan berat, kita sangat prihatin. Masih ada di negara kita, hanya karena permasalahan kecil bisa ter-

jadi peristiwa seperti ini," katanya.

Menurut Cucun, penyebab kejadian tidak boleh disederhanakan hanya pada ketiadaan alat tulis. Kemungkinan faktor lain, seperti tekanan sosial di sekolah, relasi pertemanan, dan perundungan, perlu ditelusuri agar persoalan dipahami secara utuh.

"Bisa jadi bukan hanya karena masalah pensil, melainkan juga karena *bullying* dan segala macam. Ini yang menjadi problem besar bagi kita yang harus diselesaikan," ujarnya.

Cucun menambahkan, DPR akan mendorong Komisi

[Bersambung ke hlm 15 kol 1-2]

Sejumlah Kasus Bunuh Diri pada Anak



Kasus Bunuh Diri Jadi

(Sambungan dari halaman 1)

X memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk memastikan langkah pencegahan dapat diperkuat.

Membuka komunikasi

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya telah meminta aparat pemerintah di semua tingkatan membuka ruang komunikasi selebar-lebarnya bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Keterbukaan dinilai penting agar kebutuhan mendesak, termasuk perlengkapan sekolah, dapat segera ditangani.

"Saya sudah minta kepada seluruh jajaran, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan kepada masyarakat untuk betul-betul terbuka terhadap keadaannya. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apa pun, itu harus segera disampaikan," ujar Muhaimin di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Menurut Muhaimin, persoalan yang tampak sederhana tidak boleh dibiarkan menjadi beban tersembunyi bagi keluarga. Beban ekonomi yang tidak tersampaikan berisiko memicu dampak yang lebih besar.

Muhaimin mengimbau warga tidak ragu melaporkan persoalan ekonomi, utang, ataupun kebutuhan pendidikan anak. Pemerintah akan merespons cepat setiap laporan yang masuk.

Muhaimin menyatakan pemerintah masih menelusuri di lapangan terkait kasus bunuh diri siswa di NTT. "Kita lagi terus telusuri. Yang paling penting aparat pemerintahan betul-betul responsif dan terbuka, tidak boleh lagi ada yang tersumbat," ujarnya.

Pemintaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini berkaitan dengan kasus bunuh diri YBS (10), siswa kelas IV salah satu SD di Kabupaten Ngada, NTT. Korban ditemukan tewas diduga bunuh diri di dekat sebuah pondok, tempat ia tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun, Kamis (29/1) siang.

Berdasarkan keterangan warga setempat, sebelum peristiwa terjadi, korban sempat mengeluhkan tidak memiliki pena dan buku tulis untuk keperluan sekolah. Perlengkapan belajar itu disebut bernilai kurang dari Rp 10.000, tetapi tidak mampu dipenuhi keluarga.

Di sekitar lokasi kejadian, warga juga menemukan sepuć surat tulisan tangan korban yang ditujukan kepada ibunya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyampaikan keprihatinan atas peristiwa anak SD bunuh diri di NTT. Ia memastikan kasus tersebut menjadi perhatian Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah.

Menurut Saifullah, penguatan pendampingan sosial dan pembenahan data penerima bantuan menjadi langkah penting agar keluarga rentan tidak terlewat dari jangkauan negara. "Kita harus memperkuat pendampingan, harus memperkuat data. Kita harapkan tidak ada yang tidak terdata. Ini hal yang sangat penting," ujar Saifullah.

Tak ada tanda kekerasan

Polisi memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap YBS. Peristiwa itu dinyatakan murni bunuh diri.

"Kesimpulan itu diambil berdasarkan hasil olah tempat kejadian dan visum terhadap jenazah korban serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi," kata Kepala Polres Ngada Ajun Komisaris Besar Andrey Valentin kepada *Kompas*, Rabu.

Menurut dia, tim penyelidikan telah bekerja secara maksimal untuk mengungkap secara pasti penyebab kematian korban. Diakui, banyak pihak sempat meragukan bahwa korban yang usianya baru 10 tahun itu dapat melakukan aksi bunuh diri.

Adapun Sofia Ambarini, pendiri Indonesia Sehat Jiwa, menilai, ada kemungkinan anak berusia 10 tahun bunuh diri. Kondisi itu bisa terjadi jika anak tersebut mengalami tekanan atau putus asa berulang atas sebuah kondisi.

Secara terpisah, Kepala Polda NTT Inspektur Jenderal Rudi Darmoko prihatin atas kejadian tersebut. Ia telah mengirimkan psikolog dan konselor untuk mendampingi keluarga korban.

"Kami memberikan bantuan, baik bantuan materiil maupun pembinaan dan pendampingan mental psikologi, kepada keluarga korban. Kami harapkan bisa membantu meringankan kesulitan mereka," ucap Rudi saat ditemui pada Rabu.

Rudi mengatakan, dugaan sementara penyebab YBS bunuh diri adalah masalah ekonomi. Korban meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku dan pena, tetapi tidak diberikan karena sang ibu mengaku tidak memiliki uang.

(ERN/SYA/NTA)